

**EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENATA
LINGKUNGAN PENDUDUK PEDESAAN KELURAHAN TANJUNG
AYUN SAKTI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2006-2011**

Oleh :

Robby Juzandra

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Email : rjuzandra@yahoo.com

Abstract

This research wish to see evaluation Development of Environmental Infrastructure Program of Rural Resident in Sub-District of Tanjung Ayun Sakti town of Tanjungpinang since 2006-2011. As for background Problem of this research are every factors that influencing execution of Development Of Environmental Infrastructure Program of Rural Resident in Sub-District Of Tanjung Ayun Sakti since 2006-2011 so that facilitate us to evaluate execution of these program?

This research represent qualitative research, hence data collecting technique at this research is descriptive analysis. This research use documentation (interview and observation) with informan key as information object with aim to reach the target for the shake of getting information in this research. Data type which is used in this research is primary data and secondary obtained pass/through direct interview and observation with informan key.

result of this research and solution which is writer have tought at previous Chapter which pursuant formula of it's problem, hence writer conclude that factors influencing and pursuing execution of Development Program Environmental Infrastructure Orderer of Rural Resident is weather factor and climate, budget factor which is limited enough, and observation factor.

Keywords : *Evaluation, Development of Environmental Infrastructure, town of Tanjungpinang*

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia mengambil konsep dasar pembangunan sesuai dengan kondisi terkini dari negara bangsa Indonesia, yaitu adanya keragaman dari potensi, kecakapan, keinginan dari setiap daerah di Indonesia, dan telah disepakatinya desentralisasi sebagai pola penyelenggaraan pembangunan, dimana otonomi daerah diletakan pada tingkat Kota dan Propinsi. Dengan demikian konsep dasar pembangunannya adalah bahwa tugas dari pemerintah nasional adalah menyusun visi, misi, dan strategi pembangunan nasional. Pemerintah Kota dan Kota melaksanakan sesuai dengan potensi, kecakapan dan aspirasinya. Pemerintah Propinsi bertugas untuk menjadi pendamping dan penyelaras pembangunan antar daerah otonom tersebut, tugas dari pendampingan dari pemerintah propinsi didukung oleh departemen teknis yang terkait dengan sektor yang dibangun didaerah, dalam konteks ini, setiap tingkat pemerintahan berhak melakukan perencanaan yang sesuai dengan batas-batas kewenangan mereka melalui forum koordinasi horizontal. Ini mengandung arti bahwa seluruh tahapan penyusunan perencanaan pada setiap tingkatan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif. Setiap *stakeholders* memiliki fungsi, peranan dan tanggung jawab masing-masing.

Namun pada saat yang sama, juga disadari bahwa hak dan kewenangan setiap tingkat pemerintahan untuk menyusun perencanaan pembangunan setempat melalui forum dialog dan konsultasi horisontal juga perlu diimbangi dengan adanya forum komunikasi dan dialog vertikal antar tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melakukan sinergi kebijakan serta sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka menjamin efisiensi, mencegah benturan kepentingan dan vakum kegiatan.

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 maupun UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat serta PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan

Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Kepulauan Riau merupakan propinsi baru hasil pemekaran dari Propinsi Riau. Propinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Propinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kota Bintan, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kepulauan Anambas dan Kota Lingga. Sebagai Propinsi kepulauan yang wilayahnya terdiri atas 96 % lautan. Kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan mulai usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya maupun penangkapan.

Tanjungpinang merupakan ibukota Propinsi Kepulauan Riau yang dikelilingi lautan, hal tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun internasional yang kemudian menjadi sumber pendapatan serta sebagai mata pencaharian penduduk dan pemerintah daerah itu sendiri sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih dari setengah wilayah yang terdapat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti merupakan pesisir laut, yang menjadikan warga yang berdomisili di daerah tersebut untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya bersinggungan dengan laut. Kegiatan yang dilakukan dan sebagian besar bermatapencarian sebagai nelayan, terlebih lagi budaya masyarakat yang suka membangun rumah dan toko, dilakukan disekitar dan diatas laut, maka Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau melakukan, "Program Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan di Kota Tanjungpinang".

Program diatas meliputi pembangunan infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat, adapun program pembangunannya, yaitu :

1. Pembangunan Pelantar Beton;
2. Pengaspalan Jalan;
3. Pembuatan Jalan Paving Blok;
4. Pembangunan Drainase;
5. Pembangunan Aula Kantor lurah;
6. Pembuatan Penutup Parit;
7. Pembangunan Gorong-gorong;
8. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah;

Dalam pelaksanaannya, pembangunan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti mengalami berbagai macam hambatan dan permasalahan mulai dari sarana, infrastruktur, akses jalan yang masih jelek, lemahnya koordinasi antar instansi yang berkaitan, yaitu Kelurahan - Dinas Pembangunan Umum - Pihak Pembangunan, hingga lambatnya respon dari pemerintah sendiri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang berupa deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data dan mengelompokan sesuai dengan jenis data kemudian data diolah.

Hasil Pembahasan

Dalam Pelaksanaan Penelitian Mengenai Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2011, Peneliti mencoba menganalisis mengenai permasalahan yang ada, adapun data dan hasil penelitiannya sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti

Program pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti meliputi:

1. Pembangunan Pelantar Beton

Pelantar merupakan jembatan yang dibuat diatas permukaan laut yang berfungsi sebagai penghubung dan berbentuk jalan/lintasan, pada umumnya pelantar yang dibangun oleh warga/masyarakat terbuat dari kayu. Pembangunan pelantar beton ini dilaksanakan pada tahun 2006 menggunakan Dana APBD sebesar Rp. 99.600.000,- dan telah membangun lima pelantar beton yang pada totalnya terdiri dari gang selayar 1 (satu) sampai dengan gang selayar 5 (lima), keseluruhan pelantar beton yang dibangun memiliki lebar 1,5 meter dan panjang tergantung pada permintaan/rencana pembangunan yang telah disetujui melalui proses MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). Pembangunan pelantar beton diwilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti meliputi RW 7, yaitu RT 1, RT 2, dan RT 3 karena daerah tersebut berlokasi dipinggir laut. Namun terdapat satu pelantar yang tidak terselesaikan, yaitu pelantar yang dibangun di RT 2 gang selayar 4, Pelantar ini hanya dibangun 40 meter yang seharusnya dibangun dengan panjang 80 meter.

2. Pengaspalan Jalan

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti didalam perencanaannya didalam Program Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti adalah pada tahun 2011 seluruh jalan utama di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti telah diaspal, namun pada kenyataannya dilapangan sampai hari ini masih ada jalan utama di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang masih belum diaspal, bahkan ada beberapa jalan utama yang membutuhkan perawatan kembali karena aspal yang digunakan kemungkinan adalah aspal kelas 2 yang sekarang telah mulai menunjukkan kualitasnya yakni hancur dan berlubang

3. Pembuatan Jalan Paving Blok

Pembuatan jalan paving blok sudah diterapkan diseluruh wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, pembuatan jalan paving blok difokuskan pada gang-gang saja. Tetapi terdapat jalan paving blok yang rusak parah di gang selayar 4 RW 7, RT 2, dikarenakan perbuatan seorang warga, pada awalnya warga tersebut hendak membuat kolam dan kerambah budidaya ikan disamping rumahnya yang berada dipinggir laut. Karena tidak kuat menahan bobot truk pasir yang lalu-lalang paving blok tersebut mulai merekah dan hancur, tetapi warga yang bersangkutan yang juga berprofesi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang tersebut berjanji akan memperbaikinya. Namun seiring dengan kasus pengambilan barang bukti yang berupa sejumlah ton kayu hasil tangkapan *illegal logging* yang digunakan oknum tersebut untuk kepentingan pribadi oknum tersebut telah melarikan diri. Jadi hingga saat ini jalan paving blok tersebut masih dalam keadaan rusak dan belum ada perbaikan dari pihak PU

4. Pembangunan Drainase

Pembangunan drainase difokuskan di jalan utama karena jalan beraspal hanya dibangun di jalan utama, pembangunan drainase dimulai pada tahun 2010 di jalan Arif R. Hakim. Pembangunan drainase ini dapat dikatakan telah rampung (selesai)

5. Pembangunan Aula Kantor lurah

Pembangunan aula Kantor Lurah sendiri merupakan pembangunan bertahap /berkala, pembangunan ini mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2012, namun pada pelaksanaannya pembangunan tersebut mengalami beberapa kendala, seperti faktor cuaca.

6. Pembuatan Penutup Parit

Pembuatan penutup parit dimulai pada tahun 2011 di RW 6, pembuatan penutup parit diusulkan karena meningkatnya penderita demam berdarah yang diakibatkan oleh nyamuk dan keadaan mulut parit yang terbuka lebar yang juga membahayakan pengguna jalan. Pembuatan penutup parit ini hampir rampung pelaksanaannya. Direncanakan akhir 2012 ini proyek ini akan dpat diselesaikan. Proyek ini sebenarnya dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2012, namun dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga proyek ini harus tertunda didalam pelaksanaannya menunggu anggaran dari APBD Kota Tanjungpinang

7. Pembangunan Gorong-gorong

Pembangunan gorong-gorong di mulai pada tahun 2011 di RW 9, guna menghubungkan beberapa alur parit untuk menghindari air hujan yang menggenang keruas jalan dan rumah warga. Pembangunan gorong-gorong memiliki permasalahan yang sama dengan proyek pembuatan penutup parit, yakni permasalahan anggaran yang terbatas, sehingga harus menunggu anggaran dahulu

8. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah

Pembuatan tanggul penahan tanah pada tahun 2011 di RW 2, yang tekstur permukaan tanahnya bertingkat merupakan dataran tinggi. Pembuatan tanggul ini bertujuan untuk menahan tanah agar tidak terjadi longsor menimpa rumah warga. RT akan merembukan dengan RW yang kemudian disampaikan kepada Lurah, Lurah mengadakan MUSRENBANG tingkat kelurahan, yang kemudian ketahap Kecamatan, Kota, Propinsi. Setelah rampung kemudian akan diadakan lelang proyek pembangunan, disinilah letak kelemahannya. PT atau CV yang memenangkan tender akan mulai pembangunan dengan Sistem Paket yang mana sesuai dengan jumlah dana yang akan dipakai dan materialnya seperti yang tertera didalam proposal masing-masing PT atau CV tersebut, mengakibatkan sulit untuk diawasi dan kearsipannya yang buram dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

B. Faktor-faktor Penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Faktor cuaca dan iklim.

Pengaruh cuaca dan iklim juga sangat signifikan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pada saat kegiatan produktif yang ingin dilaksanakan oleh masyarakat yang dibatasi oleh manajemen waktu yang ketat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program pemerintah yang dibatasi oleh keadaan yang tidak bisa diselesaikan dengan logika manusia, yakni faktor alam (cuaca dan iklim)

2. Faktor anggaran.

Pada permasalahan didalam Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang ini anggaran merupakan salah satu faktor penghambat dikarenakan tersendatnya anggaran mengakibatkan beberapa program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti menjadi terhambat

3. Faktor pengawasan.

Pengawasan bukanlah suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, pengawasan merupakan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Pengawasan sangat diperlukan didalam menjalankan sebuah kebijakan agar nantinya diharapkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari kebijakan tersebut

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam sebelumnya, maka Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2011, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Faktor cuaca dan iklim dimana proyek tersebut mayoritas dikerjakan pada saat akhir tahun yang mana pada saat itu merupakan musim hujan dan angin utara. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan fisik menjadi lambat.
2. Faktor anggaran yang cukup terbatas, dalam hal ini anggaran untuk program ini mayoritas hanya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
3. Faktor pengawasan yang dilakukan adalah dengan memberikan penilaian pada saat pembangunan tersebut selesai atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikontrak, sehingga proses pengawasan terkesan tidak optimal, karena tidak diawasi sejak proses pembangunan berlangsung.

Saran

Saran penulis terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Penata Lingkungan Penduduk Pedesaan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti adalah

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang harus benar-benar mendukung program ini dengan menganggarkan anggarannya didalam APBD, sehingga anggarannya dapat keluar pada awal tahun dan pengerjaan pembangunan fisik dari program tersebut dapat dilakukan pada awal tahun.
2. Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti juga tidak boleh tergantung dengan anggaran dari APBD saja, namun harus lebih kreatif, dengan mencari donatur atau investor yang mau membantu didalam pengerjaan fasilitas umum tersebut, bila perlu masyarakat dalam hal ini dengan sukarela mengumpulkan dana swadaya untuk menyelesaikan pembangunan yang masih belum selesai. Karena biasanya apabila anggaran tersebut berasal dari masyarakat secara langsung, maka infrastruktur yang nantinya akan dibangun akan lebih dijaga oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku :

Gani, Arifin. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilar Pembangunan*, Jakarta : Pustaka Kendi

Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lapera

Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung* : Humuniora Utama Press

Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang

Irfan, Muhammad. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Isbandi, Rukmunto Adi.2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Lv-i'Lut

Nugroho, Rian. 2003. *Reiventing Pembangunan*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Pranaka, AMW dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta.

Rasyaf M. 1994. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*. Yogyakarta: Kanisius.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta

Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju

Wibowo, Moeljarto. 1996. *Ilmu Kemasyarakatan*. Jakarta : Sananta Press

Peraturan / Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Media Cetak :

AR yakur, Mbojo Wordpress. 15 April 2007

Delta Kepri. 28 mei – 20 juni 2012. Evaluasi dan monitoring, Kearsipan kota

Tanjungpinang, Reformasi Birokrasi. hlm. 7, 8, 9, 10.